



Santri dan Politik (Studi Peran Putra Kiai di Jawa Timur)

Nilna Rahmayanti¹, Mohammad Affandi², Ni'matul Izza³

^{1,3}Universitas Syeikh Nawawi Banten, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: nilnarahmayanti@stifsyentra.ac.id, mohammadaffandi5@gmail.com, nimatulizza@stifsyentra.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-31 Keywords: <i>Politics;</i> <i>Student;</i> <i>Role;</i> <i>Gus;</i> <i>Religious Elite.</i>	This research explains about the political role of putra kiai. Lately, politics has been very actively followed by many groups including those from the boarding schools. In its development, politics are often followed by kiai children commonly referred to as putra kiai. This research focuses on the role and description of young Islamic leaders, namely putra kiai who take part in political contestation in East Java. Among them were Ahmad Athoillah who came from Jombang and Syaikhul Islam Ali from Sidoarjo. This research uses a qualitative method. The data traced includes primary data and secondary data through sources. The data collected through documentation, observation and interview techniques. The data will go through a descriptive analysis process and be narrative written according to the research findings. The conclusion of this study, shows that the political role of this putra kiai has a very big impact on the development and progress of Islamic boarding schools and students.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-31 Kata kunci: <i>Politik;</i> <i>Santri;</i> <i>Peran;</i> <i>Gus;</i> <i>Elite Agama.</i>	Penelitian ini menjabarkan tentang peran politik putra kiai. Akhir-akhir ini, politik sangat gencar diikuti oleh banyak kalangan diantaranya yakni dari kalangan pondok pesantren. Dalam perkembangannya, politik tersebut banyak diikuti oleh anak-anak kiai atau yang biasa disebut dengan putra kiai. Penelitian ini berfokus pada peran dan deskripsi tokoh muda Islam yakni putra kiai yang ikut andil dalam kontestasi politik di Jawa Timur. Di antaranya adalah Ahmad Athoillah yang berasal dari Jombang dan Syaikhul Islam Ali dari Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang ditelusuri meliputi data primer dan data sekunder melalui narasumber. Data-data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Data tersebut akan melalui proses analisis deskriptif dan ditulis secara naratif sesuai temuan penelitian. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, menunjukkan bahwa peran politik putra kiai ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan pondok pesantren maupun santri.

I. PENDAHULUAN

Pentas politik merupakan ruang kompetisi bagi siapa saja yang ingin meraih kekuasaan dan berperan dalam demokrasi. Politik tidak dapat dipisahkan dari negara karena menjadi fondasi utama proses pengambilan keputusan publik. Pemerintah pun memberi dukungan melalui fasilitas dan ruang partisipasi politik agar kualitas demokrasi semakin meningkat. Minat terhadap politik semakin tinggi karena dianggap sebagai sarana strategis dalam memengaruhi pola pikir masyarakat. Sejalan dengan itu, politik dipahami sebagai aktivitas pengendalian keputusan publik melalui instrumen otoritatif dan koersif, sebagaimana didefinisikan Gabriel A. Almond (Basri, 2011). Artinya, politik berkaitan erat dengan siapa yang memiliki otoritas, bagaimana otoritas digunakan, dan untuk tujuan apa keputusan dibuat.

Dalam konteks Indonesia, dinamika politik sangat menarik karena masyarakatnya bersifat dinamis. Pesta demokrasi menjadi ajang kompetisi lintas kalangan, termasuk para pemuda dan kini semakin banyak diikuti oleh kalangan pesantren seperti para santri. Fenomena meningkatnya keterlibatan santri dalam politik tidak terlepas dari tradisi panjang hubungan pesantren, kiai, dan negara.

Secara historis, peran pesantren dalam politik telah berlangsung sejak masa Kesultanan Mataram II. Kiai dan santri berperan dalam perjuangan fisik, diplomasi, hingga pendirian organisasi politik Islam seperti Masyumi, MIAI, PSII, dan Perti. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dipahami sebagai kekuatan spiritual sekaligus kekuatan politik. Menurut Prayogo (2009), kiai memiliki peran multidimensi: penyiar agama, pendidik, pemuka sosial, dan juga aktor politik,

baik secara langsung melalui partai maupun secara tidak langsung.

Namun, pada masa Orde Baru, peran politik kiai mulai terpinggirkan, memunculkan polemik panjang tentang perlu tidaknya kiai terlibat dalam politik. Perdebatan ini tampak dari gagasan Nurcholish Madjid “Islam Yes, Partai Politik No”, yang kemudian ditanggapi oleh Emha Ainun Najib melalui slogan “Islam Yes, Politik Yes”. Sikap ormas Islam seperti NU yang kembali ke Khittah 1926 menunjukkan adanya proses pencarian bentuk hubungan ideal antara agama dan politik (Prayogo, 2009).

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa elite agama kembali aktif dalam politik. Tidak hanya kiai, tetapi juga putra kiai atau Gus semakin banyak memasuki ranah politik. Para Gus sejak kecil dididik dalam tradisi keilmuan pesantren sehingga memiliki khazanah keagamaan yang kuat, karisma, dan posisi sosial yang dihormati—modal yang turut mendorong mereka terjun ke kontestasi politik.

Di Jawa Timur, wilayah dengan jaringan pesantren besar, banyak Gus mulai mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, legislatif, atau jalur politik lainnya. Para Gus memanfaatkan figuritas kiai dan nama pesantren sebagai modal sosial yang sering terlihat melalui poster dan baliho kampanye. Mereka mengikuti jalur independen maupun partai politik, dengan tantangan untuk membuktikan kapasitas mereka di arena politik.

Fenomena meningkatnya keterlibatan putra kiai dalam politik menunjukkan transformasi orientasi pesantren yang kini ingin lebih terlibat dalam pengelolaan pemerintahan dan kebijakan publik. Para Gus dianggap mampu menjadi aktor penting dalam memastikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga selaras dengan perkembangan pesantren. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui latar belakang putra kiai dalam mengikuti politik. (2) Untuk mengetahui strategi pemenangan politik putra kiai. (3) Untuk mengetahui peran politik putra kiai terhadap pondok pesantren.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif sebagaimana ditegaskan Bogdan (1999), yang dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan serta perilaku yang dapat diamati,

sebagaimana juga dijelaskan Suyanto (2012). Metode ini bekerja dalam setting alamiah dan berupaya memahami fenomena berdasarkan makna yang diberikan oleh subjek penelitian. Salim (2006) menegaskan bahwa penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif dan memanfaatkan beragam bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, riwayat hidup, wawancara, dan pengamatan untuk menggambarkan momen-momen penting dalam kehidupan individu maupun kolektif. Ia juga menekankan bahwa pemilihan metode sangat bergantung pada research question, sebab tidak semua fenomena dapat diungkap melalui pendekatan kualitatif, meskipun banyak fenomena sosial hanya bisa dipahami secara mendalam melalui metode ini. Penelitian ini karena itu tidak hanya melihat fenomena dari permukaan, tetapi juga menelaahnya secara utuh melalui wawancara mendalam sebagaimana dianjurkan Raharjo (2017). Pemilihan metode kualitatif ini dilakukan agar peneliti dapat memaparkan secara detail pengetahuan tentang putra kiai yang terlibat dalam dunia politik serta unsur-unsur lain yang mempengaruhi peran mereka.

Tahapan penelitian dimulai dari penetapan fokus penelitian dan research question sebagaimana dijelaskan Suyanto (2017). Proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data berjalan secara berkesinambungan karena sifat penelitian kualitatif memungkinkan peneliti melakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data. Data dianalisis sejak awal melalui proses klarifikasi dan kategorisasi berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus kajian. Pemahaman akhir disajikan dalam bentuk naratif, termasuk kemungkinan penyusunan life history yang menggambarkan pengalaman penting subjek penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Mengacu pada Arikunto (1999) dan Abdurrahman (1999), sumber primer meliputi dokumen asli serta wawancara langsung dengan putra kiai, orang tua, maupun masyarakat yang terlibat. Adapun sumber sekunder sebagaimana dijelaskan Kuntowijoyo (2011) mencakup buku, artikel, catatan, penelitian terdahulu, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dokumentasi, menurut Moleong (2010), berfungsi untuk menguji, menafsirkan, dan mendukung temuan lapangan melalui berbagai

dokumen seperti transkrip, catatan, surat kabar, dan pamflet. Observasi digunakan untuk mengamati langsung interaksi, strategi, serta aktivitas putra kiai dalam politik, sesuai dengan penjelasan Nadzir (2003). Sementara itu, wawancara dilakukan sebagai percakapan terarah untuk memperoleh informasi mendalam tentang kehidupan sosial subjek, seperti dijelaskan Koentjaraningrat (1977). Arikunto (2010) membedakan wawancara menjadi terstruktur dan tidak terstruktur; penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan secara fleksibel. Wawancara dilakukan kepada beberapa putra kiai yang aktif dalam politik, seperti Syaikhul Islami Ali dari Sidoarjo yang menjadi anggota DPR RI 2019–2024 di dapil Jawa Timur I, serta Ahmad Athoillah dari Jombang yang menjadi anggota DPRD Jawa Timur 2019–2024 di dapil II.

Pengolahan data dilakukan melalui tiga proses: *classifying*, *organizing*, dan *analyzing*. Proses pengelompokan data sebagaimana dijelaskan Moleong (2010) dilakukan untuk mengklarifikasi seluruh data berdasarkan kebutuhan penelitian. Narbuko (1997) menekankan pentingnya penyusunan data dokumentasi agar sesuai dengan rumusan masalah. Analisis kemudian dilakukan secara sistematis dengan menyusun temuan lapangan secara kuantitatif sebagaimana dikemukakan Muhajir (1997), meskipun pendekatan utama penelitian tetap bersifat kualitatif.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi sebagaimana dipahami Faisal (1992), yaitu kajian ilmiah terhadap pesan dan komunikasi untuk menjelaskan data yang diperoleh. Semua data kemudian dianalisis menggunakan teori peran untuk memahami keterlibatan politik para putra kiai. Pendekatan ini sejalan dengan metode deskriptif kualitatif menurut Muhajir (2010), yang bertujuan mendeskripsikan perilaku, peristiwa, dan aktivitas secara mendetail sehingga peneliti dapat mengungkap dinamika politik putra kiai di Jawa Timur secara mendalam.

Sistematika penulisan penelitian kemudian disusun ke dalam empat bab. Bab pertama membahas pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode, dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi tinjauan pustaka mengenai peran politik putra kiai. Bab ketiga menggambarkan kondisi umum

dan profil para putra kiai yang terjun ke politik. Bab keempat memaparkan peran politik mereka, latar belakang keterlibatan mereka dalam politik, dampak terhadap pesantren, serta respons masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Putra kiai Mengikuti Politik

1. Athoillah

Ketertarikan narasumber dalam mengikuti dunia politik berawal dari dasar keilmuan yang diperoleh sejak masa pendidikan di pondok pesantren. Sejak mondok, ia memiliki kegemaran membaca buku-buku sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan politik, sekaligus mendapatkan wawasan tentang *agam sulthoniyah*. Ketertarikan ini semakin kuat ketika ia melanjutkan studi S2 di Universitas Airlangga Surabaya dengan mengambil konsentrasi ilmu politik. Inspirasi lain datang dari sejarah keluarga, khususnya kakeknya, KH Bisri Syansuri, yang pernah menjadi anggota DPR dan berjuang merumuskan undang-undang perkawinan yang sesuai syariat Islam. Keteladanan tersebut menumbuhkan kesadaran bahwa keterlibatan dalam politik dapat menjadi sarana memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini.

Selain latar belakang keilmuan, dukungan orang tua juga menjadi pendorong kuat. Orang tua mendorongnya untuk mengamalkan ilmu pondok dan ilmu akademik demi kemaslahatan bersama, bahkan menegaskan bahwa tidak cukup hanya menjadi pengamat politik, tetapi harus berani menjadi pelakunya. Dorongan berikutnya datang dari ASPARAGUS, asosiasi para Gus yang menginginkan keterlibatan aktif keluarga pesantren dalam struktur pemerintahan—baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif—agar para Gus dapat mengawal kebijakan negara, mendampingi peran Nahdlatul Ulama, dan ikut menjaga keutuhan NKRI dari ancaman kelompok radikal yang akhir-akhir ini mempengaruhi dinamika politik nasional.

Motivasi lain yang tidak kalah penting adalah keinginan untuk memberdayakan pondok pesantren. Narasumber menyadari bahwa pendidikan pesantren sering dipandang sebelah mata, ijazahnya kurang dihargai, dan lulusannya kerap terpinggir-

kan dalam dunia kerja. Padahal pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan bahkan menjadi salah satu rujukan Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan konsep pendidikan nasional. Pengalaman hidup sebagai santri sejak kecil membuat narasumber merasa terpanggil untuk memperjuangkan kesetaraan pesantren dengan pendidikan formal.

Di samping itu, narasumber ingin meningkatkan pemberdayaan santri yang sesungguhnya memiliki potensi besar, terbiasa hidup mandiri, tetapi masih sering diremehkan dalam dunia industri dan dianggap tidak modern. Ia ingin agar santri memperoleh hak dan kesempatan yang sama dengan pelajar lainnya, sekaligus memiliki ruang untuk berkarya dan berkembang sesuai kemampuan mereka.

Melalui berbagai pengalaman tersebut, narasumber menyimpulkan bahwa latar belakang dirinya terjun ke dunia politik merupakan perpaduan antara keilmuan yang dimiliki, dukungan orang tua, dorongan sesama Gus melalui ASPARAGUS, keinginan memperjuangkan pesantren, dan komitmen memberdayakan santri. Ia menegaskan bahwa langkah politiknya bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mengejar jabatan atau keuntungan, melainkan untuk berkhidmah kepada NU, masyarakat luas, serta mewujudkan harapan-harapan yang lahir dari pengalaman hidupnya sendiri..

2. Syaikhul Islam Ali

Proses awal narasumber terjun ke politik berangkat dari kesadaran bahwa politik tidak selalu buruk atau kotor. Ia melihat bahwa bagi seorang Gus, keterlibatan dalam politik justru dapat menjadi bagian dari dakwah karena dakwah memiliki cakupan yang sangat luas dan bisa dilakukan melalui jalur apa pun, termasuk politik. Menurutnya, seorang Gus yang berada di politik tidak selalu harus disebut politisi, karena bisa saja ia sebenarnya adalah pendakwah yang memilih jalur politik sebagai ruang perjuangannya. Selama ini dakwah Gus lebih banyak dilakukan melalui jalur kultur, yang memang memiliki ketahanan sangat panjang tetapi perubahan yang ditimbulkan bergerak lambat.

Ia mencontohkan dakwah Wali Songo yang berlangsung lama karena melalui jalur budaya, namun pengaruhnya bertahan hingga ratusan tahun. Sebaliknya, dakwah Islam di Andalusia, Serbia, Bosnia, dan kawasan Balkan mudah hilang karena disebarkan lewat jalur struktur dan militer. Perubahan melalui kekuasaan terasa cepat tetapi tidak kokoh. Dari pemahaman ini, narasumber melihat pentingnya mengawinkan dua jalur dakwah—kultur dan struktur—agar dakwah dapat berjalan berkelanjutan tetapi juga mampu melakukan perubahan strategis.

Ia menegaskan bahwa politik kini sangat dibutuhkan sebagai instrumen dakwah, bukan tujuan. Politik berfungsi sebagai wasilah untuk memperluas dampak kebaikan, karena tanpa kekuasaan banyak perubahan sulit dilakukan atau berdampak kecil. Kekuasaan memberikan ruang untuk memperjuangkan kepentingan organisasi dan identitas. Ia menggambarkan bahwa ketika organisasi X berkuasa, maka ia akan cenderung mendahulukan kelompoknya; demikian pula sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa struktur politik memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan keputusan publik.

Motif lainnya adalah upaya menjaga negara (*khifdud daulah*) dan menjaga agama (*khifdud din*). Narasumber melihat maraknya gerakan khilafah yang membawa paham-paham keagamaan tertentu dan membenturkannya dengan negara. Mereka yang belum memahami agama dan kebangsaan menjadi mudah terpengaruh oleh doktrin tersebut. Untuk mencegah ancaman terhadap persatuan bangsa, diperlukan kader pemuda agama yang duduk di pemerintahan. Dalam hal menjaga agama, narasumber melihat fenomena pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obatan oleh pemuda. Kondisi ini membuatnya semakin terdorong untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melalui jalur politik, karena pemuda adalah generasi yang akan menentukan masa depan agama dan negara.

Latar belakang penting lainnya adalah keinginan untuk memberdayakan pesantren dan santri. Ia melihat bahwa di era globalisasi, pesantren tidak boleh tertinggal karena memiliki kedudukan setara dengan pendidikan lainnya.

Pesantren harus diperkuat melalui fasilitas, sarana, prasarana, dan perhatian pemerintah. Santri, yang sering dianggap kampung atau tidak modern, harus diberdayakan dan diberi ruang yang sama seperti pelajar lain. Narasumber meyakini bahwa santri mampu berkontribusi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga ekonomi.

Dari seluruh uraian tersebut, narasumber menyimpulkan bahwa motivasinya mengikuti politik adalah untuk meluruskan cara pandang negatif terhadap politik, memanfaatkannya sebagai jalur dakwah, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pesantren dan santri, menjaga agama dan negara, serta menghidupkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi narasumber, politik bukan tempat mencari keuntungan diri, tetapi ladang pengabdian.

B. Strategi Pemenangan Dalam Politik

1. Athoillah

Kontestasi politik digambarkan sebagai arena yang menarik namun menuntut kerja keras, kehati-hatian, dan kemampuan strategis. Meskipun setiap peserta ingin menang, prosesnya tidak dapat ditempuh secara gegabah karena politik melibatkan seluruh tenaga, pikiran, serta berbagai unsur pendukung. Untuk itu, Athoillah merancang strategi yang berlapis agar mampu bersaing secara optimal.

Strategi pertama bersumber dari pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, tempat ia lahir dan dibesarkan. Dukungan keluarga menjadi fondasi awal karena secara otomatis mereka memihak dan menyebarkan informasi kepada kerabat. Santri dikumpulkan di aula untuk diberi pemahaman bahwa keluarga pesantren sedang mencalonkan diri dan membutuhkan doa serta dukungan suara. Santri yang berasal dari banyak daerah di Jawa Timur menghadirkan potensi suara signifikan. Selain itu, para wali santri juga diundang untuk menerima sosialisasi serupa. Jaringan alumni pondok pesantren yang memiliki hubungan erat dengan pesantren memperkuat basis dukungan melalui komunikasi intensif dan solidaritas emosional.

Strategi berikutnya ialah membangun relasi melalui pertemanan dan organisasi.

Teman-teman sejak masa mondok, perkuliahan, hingga jejaring sosial di Jawa Timur menjadi saluran efektif untuk menyebarkan informasi politik. Melalui organisasi, terutama Nahdlatul Ulama dan ASPARAGUS, Athoillah memiliki pengalaman panjang dan posisi strategis, seperti menjadi bendahara PW IPNU Jawa Timur dan ketua di berbagai struktur organisasi. Pengalaman ini membuatnya dikenal oleh banyak orang, sehingga jejaring organisasi memperluas jangkauan sosialisasi dan memperkuat legitimasi pencalonannya.

Strategi ketiga ialah memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraan politik. Pemilihan PKB didasarkan pada kedekatannya dengan pesantren dan para masayikh, serta posisi ketua umum yang berasal dari lingkungan pesantren. Bagi Athoillah, bergabung dengan PKB merupakan bentuk khidmah kepada ulama, santri, dan masyarakat. Kedekatan PKB dengan Ahlusunnah Wal Jama'ah dan basis kuatnya di Jawa Timur memperbesar peluang kemenangan. Setelah resmi mendapat nomor urut lima di Dapil VI (Jombang-Mojokerto Kota), ia menyusun strategi tambahan yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayah tersebut.

Strategi terakhir terwujud melalui pemberdayaan pemuda dan keterlibatan langsung di masyarakat. Ia menyapa warga, berdiskusi, sowan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta meminta doa dan dukungan mereka. Pemuda dirangkul melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kreativitas berbasis UKM, seperti program *millennial outlook* yang mendorong kemandirian ekonomi generasi muda. Kegiatan-kegiatan ini membangun kedekatan emosional antara calon dan masyarakat. Kedekatan ini dinilai sebagai modal penting dalam politik karena masyarakat cenderung memilih calon yang hadir, peduli, dan terlibat dalam kehidupan mereka.

Seluruh strategi tersebut menunjukkan bahwa kemenangan dalam kontestasi politik bukan hanya soal kekuatan formal partai, tetapi juga hasil dari dukungan pesantren, jejaring sosial yang kuat, kedekatan dengan masyarakat, serta

kemampuan menggerakkan pemuda sebagai kekuatan sosial yang vital.

2. Syaikhul Islam

Dalam mengikuti kontestasi politik diperlukan penguasaan menyeluruh terhadap berbagai aspek karena pengetahuan saja tidak pernah cukup. Politik menuntut energi, pemikiran, dan tindakan yang matang, terutama karena setiap suara memiliki nilai yang sama tanpa memandang latar belakang pemilih. Untuk itu, dukungan harus diperoleh melalui strategi yang tepat, yang tidak bisa dilepaskan dari isu-isu yang berkembang. Syaikhul Islam Ali menekankan bahwa strategi politik harus bergerak mengikuti isu, termasuk isu primordialisme yang dapat memengaruhi kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihan.

Strategi pertama dimulai dari dukungan internal keluarga dan pondok pesantren Progresif Bumi Sholawat yang diasuh oleh orang tuanya. Dengan adanya ribuan santri, dukungan keluarga besar, santri, wali santri, dan jama'ah pengajian rutin menjadi basis awal yang kuat. Orang tua dan saudara memberikan dukungan penuh sebagai bagian dari pembagian tugas dakwah dalam keluarga, sementara santri diberi pemahaman bahwa pencalonan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memperkuat dakwah dan menjaga keutuhan NKRI. Wali santri juga didekati melalui sosialisasi intensif agar memahami tujuan pencalonan tersebut.

Strategi berikutnya dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat melalui perbaikan musholla dan masjid. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjawab aspirasi masyarakat. Perbaikan sarana ibadah dipandang sebagai bentuk dakwah yang nyata, mengingat banyak musholla dan masjid desa yang membutuhkan perhatian. Ketika masyarakat merasakan manfaat langsung dari perbaikan tersebut, simpati muncul dengan sendirinya dan menjadi modal penting untuk memperoleh dukungan politik.

Selanjutnya, Syaikhul Islam Ali menguasai public affair dan public relation melalui keterlibatan dalam berbagai kelompok sosial dan keagamaan seperti jama'ah yasin tahlil, muslimat, dan

pengajian rutin. Kelompok-kelompok ini memiliki solidaritas kuat dan jaringan yang luas sehingga efektif dalam menyebarkan informasi. Pendekatan dilakukan dengan masuk ke dalam aktivitas mereka, memberikan sosialisasi, serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sehingga dukungan mereka semakin solid.

Optimalisasi pemuda juga menjadi strategi penting. Pemuda dianggap memiliki peran signifikan karena loyalitas, daya jangkauan, dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi serta media sosial. Pemuda desa dan kota dirangkul untuk membentuk komunitas di masing-masing wilayah. Mereka diajak berdiskusi, diberi sosialisasi, serta dilibatkan sebagai tim pemenang. Kemampuan pemuda dalam desain grafis dan pengelolaan media sosial digunakan untuk membuat materi kampanye, publikasi, dan penyebaran informasi secara cepat dan luas.

Strategi terakhir adalah melalui jalur partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagai partai yang lahir dari kalangan kiai dan membawa nilai-nilai dakwah, PKB dianggap sesuai dengan prinsip ta'dzim seorang santri kepada kiai. Melalui partai ini, ia mendapatkan dukungan administratif, publikasi, serta kekuatan struktural untuk maju di Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo). Jalur partai memperkuat langkah politiknya sekaligus menjadi bentuk kelanjutan perjuangan para kiai yang selama ini berdakwah melalui berbagai lini.

Melalui kombinasi dukungan internal, keterlibatan masyarakat, penguatan jaringan kultural, pemberdayaan pemuda, dan peran partai politik, strategi Syaikhul Islam Ali membentuk pendekatan komprehensif yang menempatkan dakwah, kultur pesantren, dan pengabdian publik sebagai inti dari kontestasi politik yang dijalankannya.

C. Peran Politik Putra kiai

1. Athoillah

Peran politik yang dijalankan Athoillah Ahmad berfokus pada pemberdayaan pondok pesantren dan santri dengan menempatkan khidmah sebagai prinsip utama. Ia memandang bahwa pesantren harus terus ditingkatkan di berbagai aspek

karena lembaga ini mencetak generasi berakhlak baik yang membutuhkan sarana dan prasarana memadai agar proses belajar berjalan optimal dan potensi santri dapat berkembang sepenuhnya. Ketika ia mulai duduk di kursi legislatif dan terlibat dalam bidang perekonomian, ia menggagas berbagai ide untuk mendorong peningkatan ekonomi, yang salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia melihat bahwa ketergantungan masyarakat termasuk santri pada pekerjaan pabrik tidak cukup untuk menjawab tantangan persaingan usaha modern. Karena itu, santri perlu diperkuat dengan wawasan dan karakter ekonomi melalui motivasi kewirausahaan yang diberikan dengan menghadirkan para santri yang telah sukses sebagai teladan agar pola pikir dan semangat mereka tumbuh.

Selain motivasi, Athoillah Ahmad juga mendorong pelatihan praktis sesuai minat dan kemampuan santri, seperti bertani, berdagang, dan beternak. Ketika santri telah memiliki kemampuan dan kebiasaan berwirausaha, mereka dapat memahami pentingnya kemandirian ekonomi serta mampu berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi bonus demografi tahun 2030 yang menurut data Badan Statistik Nasional akan mencapai sekitar 70% usia produktif. Persiapan dini diperlukan agar santri tidak menjadi beban negara, tetapi menjadi kekuatan ekonomi baru.

Di bidang kebijakan, ia mengusulkan program “one pesantren one product” dan “job center” kepada Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat menjabat di komisi B legislatif. Program ini ditujukan bagi pesantren yang belum memiliki produk, baik berupa makanan, minuman, percetakan, maupun produk lain yang dapat dikembangkan sebagai sarana peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi santri serta lembaga pesantren. Selain itu, ia juga berperan dalam mengusulkan KH. Bisri Syansuri sebagai pahlawan nasional. Ia menilai bahwa perjuangan KH. Bisri Syansuri bersama KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbullah dalam kemerdekaan Indonesia harus diakui secara resmi oleh negara. Sebagai santri yang memegang

prinsip *sami’na wa atho’na* kepada kiai, ia merasa bahwa tugasnya sebagai anggota legislatif adalah mengangkat derajat para ulama. Usulan ini bahkan telah dibahas hingga tingkat nasional bersama para Gus dan tokoh santri lain untuk kemudian dibawa kepada Presiden.

Dengan demikian, peran politik Athoillah Ahmad mencakup pemberdayaan ekonomi santri dan pesantren, penguatan kapasitas SDM menghadapi tantangan demografi, serta upaya mengangkat martabat ulama melalui pengusulan gelar pahlawan nasional untuk KH. Bisri Syansuri.

2. Syaikhul Islam

Peran politik yang dijalankan Syaikhul Islam Ali berfokus pada peningkatan mutu pondok pesantren dan pemberdayaan santri melalui berbagai langkah strategis yang berkelanjutan. Ia melihat bahwa pesantren, sebagai lembaga pendidikan tertua dan berperan besar dalam sejarah bangsa, harus terus ditingkatkan kualitasnya mulai dari pembangunan fisik, sarana-prasarana, hingga desain tata kelola yang lebih modern. Baginya, pesantren tidak boleh tertinggal dari lembaga pendidikan lainnya, dan hanya melalui keterlibatan kaum santri dalam politik, pesantren bisa memperoleh perhatian yang layak dari pemerintah. Pengalaman hidup sebagai santri membuatnya merasa berkewajiban memperjuangkan pesantren hingga mencapai pengakuan dan dukungan yang lebih luas.

Selain pemberdayaan lembaga pesantren, Syaikhul Islam Ali juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas santri. Ia melihat bahwa selama ini santri kerap dianggap sebelah mata, ijazahnya kurang dihargai, dan kemampuannya diragukan. Karena itu, ia mengambil langkah pembaruan pendidikan dengan mengemas kurikulum yang lebih modern, berbasis sains dan teknologi, serta meniru standar pendidikan Eropa. Fasilitas kelas diperbaiki, lengkap dengan perangkat seperti LCD, proyektor, wifi, serta sarana belajar lain yang nyaman dan mendukung. Santri tidak hanya mengaji, tetapi juga diberi keterampilan tambahan, terutama dalam penguasaan bahasa asing—Inggris, Jepang, Mandarin, dan lainnya—melalui

tutor profesional dan kerja sama dengan lembaga bahasa, sehingga mereka memiliki nilai jual tinggi di dunia kerja. Upaya ini terbukti membuahkan hasil ketika santri mampu menjuarai berbagai olimpiade bahasa dan siap menghadapi kompetisi global.

Pemberdayaan juga dilakukan melalui pelatihan teknologi. Santri diajak untuk melek informasi dan komunikasi, mempelajari desain grafis, pengelolaan media sosial, hingga pembuatan sistem digital seperti platform penerimaan siswa baru atau pembelajaran daring. Fasilitas ruang multimedia disiapkan secara khusus, dilengkapi sarana modern dan pengajar yang kompeten, sebagian berasal dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Dengan keterampilan ini, santri mampu menghasilkan karya ilmiah, penemuan berbasis robotika, bahkan memperoleh akses masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes.

Di bidang peningkatan kualitas intelektual dan spiritual, ia mendorong santri mengikuti studi banding ke Jerman, Inggris, dan Finlandia untuk mempelajari sistem pendidikan modern. Kerja sama internasional dilakukan agar santri dapat memperluas wawasan dan pengalaman. Tidak hanya itu, ia juga memfasilitasi pertukaran pelajar dan studi ke Universitas Al-Azhar Mesir, universitas ternama yang telah melahirkan banyak ulama besar. Seleksi ketat dilakukan melalui uji prestasi akademik dan non-akademik, sehingga santri termotivasi bersaing secara sehat dan belajar dengan target yang jelas ketika berada di sana.

Dalam aspek ekonomi, Syaikhul Islam Ali membina santri agar kreatif berwirausaha. Santri dilatih bertani, beternak, berdagang, hingga menghasilkan produk yang dikelola melalui toko pesantren bernama Alimart. Ia juga mengembangkan wirausaha berbasis IT seperti desain logo, pembuatan stiker, dan pembuatan sistem digital. Upaya ini memperkuat kemandirian santri dan sejalan dengan program pemerintah mengenai UMKM, sehingga santri dapat memberi kontribusi nyata pada ekonomi lokal.

Perhatiannya juga diarahkan pada kesejahteraan guru madrasah. Ia memahami bahwa guru pesantren sering

tidak mendapatkan perlakuan setara dengan guru di luar pesantren, padahal tanggung jawab mereka sangat besar—mengajar pengetahuan, mendidik akhlak, dan mendampingi santri hampir sepanjang waktu. Karena itu, ia memperjuangkan peningkatan kompensasi melalui jalur politik dengan mengusulkan kepada Kemenag RI, hingga akhirnya disetujui oleh Presiden. Guru bersertifikasi kini mendapat tambahan insentif, sementara guru yang belum memiliki syahadah difasilitasi untuk mengikuti pelatihan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, peran politik Syaikhul Islam Ali mencerminkan konsep peran menurut Sarlito, Biddle, dan Thomas, di mana ia bertindak sebagai aktor yang memanfaatkan interaksi sosial dengan berbagai kelompok orang tua, saudara, santri, wali santri, dan kelompok masyarakat lain untuk mendorong perubahan. Perilakunya diwujudkan melalui pendekatan langsung, publikasi, sosialisasi, serta tindakan nyata dalam kebijakan. Pengaruh dan kedudukannya memungkinkan ia menggerakkan perubahan yang berdampak pada pesantren dan santri. Peran ini terbukti konkret karena menghasilkan pemberdayaan pesantren, penguatan kompetensi santri, perluasan kesempatan pendidikan, peningkatan keterampilan teknologi dan wirausaha, serta peningkatan kesejahteraan guru. Melalui langkah-langkah tersebut, santri kini dapat berperan signifikan dalam pembangunan masyarakat dan mendukung pemerintah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Latar belakang putra kiai mengikuti politik adalah. Pertama, Athoillah. Ia mengikuti politik dikarenakan didukung oleh keilmuan yang ada, dorongan dari orang tua, dorongan dari Aspirasi Para Gus (ASPARAGUS), memiliki keinginan khidmah untuk memberdayakan pondok pesantren dan santri. Kedua, Syaikhul Islam Ali. Ia mengikuti politik atas dasar membenarkan cara pandang politik yang selama ini dinilai buruk, politik digunakan sebagai media dakwah, dakwah bil khal, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ingin meningkatkan pemberdayaan pondok pesantren dan santri, politik digunakan

untuk menjaga agama dan keutuhan negara.

2. Strategi pemenangan putra kiai dalam politik adalah pertama, strategi yang dilakukan oleh Athoillah. Ia meminta dukungan dari pondok pesantren, membangun relasi dengan organisasi lain, melalui partai politik, dan melakukan pemberdayaan pemuda. Kedua, strategi yang dilakukan oleh Syaikhul Islam. Ia meminta dukungan dari internal keluarga, melakukan perbaikan masjid dan mushola, menguasai public affair dan public relation, mengoptimalkan pemuda, dan melalui partai politik
3. Peran politik putra kiai terhadap pondok pesantren adalah pertama, peran yang dilakukan oleh Athoillah. Ia ingin memberdayakan pondok pesantren, program "one pesantren one product", pengusulan KH Bisri Syansuri sebagai pahlawan nasional. Kedua, peran politik yang dilakukan oleh Syaikhul Islam adalah pemberdayaan pondok pesantren, pemberdayaan santri, pelatihan teknologi kepada santri, peningkatan pendidikan santri dalam konteks spiritual dan intelektual, memberi fasilitas dan pertukaran pelajar di Al-Azhar, Kairo Mesir, Pemberdayaan santri kreatif dibidang enterpreneur, dan peningkatan kejesahteraan guru-guru madrasah.

B. Saran

Saran adalah kritik dan masukan untuk membangun, dalam hal ini dengan mengacu apa yang telah penulis teliti. Penulis memberikan saran beberapa hal:

1. Semakin bertambahnya ketertarikan masyarakat khususnya kalangan pondok pesantren di dalam politik di Indonesia, perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan untuk membuka peluang peneliti lainnya menghasilkan data yang terbaru mengenai fenomena politik di kalangan pesantren.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak jumlah subjek yang akan diteliti dengan lokasi yang bervariasi guna mendapatkan data yang komperhensif dan diharapkan adanya pengembangan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kalangan pondok pesantren dalam mengikuti politik.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian teori yang akan

digunakan dan menggunakan metode penelitian yang lebih variatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta.
- Basri, S. (2011). *Pengantar ilmu politik*. Indie Book Corner.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, S. (1992). *Format-format penelitian sosial*. Rajawali Press.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode penelitian masyarakat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar ilmu sejarah*. Yayasan Bentang Budaya.
- Laksmi. (2017). Teori interaksionisme simbolik dalam kajian ilmu perpustakaan dan informasi. *Pustabiblia: Journal of Library and Information Science*, 1(1).
- Moelong, L. J. (1999). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, N. (1992). *Metode penelitian kualitatif: Telaah positivistik rasionalistik, fenomenologik realisme metafisik*. Rake Serasin.
- Nadzir, M. (2003). *Metode penelitian kualitatif*. Ghalia Indonesia.
- Raharjo, M. (2017). *Studi kasus penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Saifullah. (2006). *Buku panduan metodologi penelitian*. UIN Press.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali.
- Suhardono, E. (1994). *Teori peran: Konsep, derivasi dan implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukamto. (1999). *Kepemimpinan kiai dalam pesantren*. IKAPI.
- Suprayogo, I. (2009). *Kyai dan politik: Membaca citra politik kyai*. UIN Malang Press.

Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *Metodologi penelitian sosial*. Prenada Media Group.

Titis Thoriquttyas. (n.d.). Pemuda, elit agama Islam dan politik: Preferensi gus dan lora dalam kontestasi politik. *Jurnal*.